

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Moh. Mahsun, dkk (2016:91), mendefinisikan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian kegiatan pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, penyajian, atau pelaporan data keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.”

Deddi Noerdiawan dan Ayuningtyas Hertanti (2014:201), mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau aplikasi komputer.”

Menurut Abdul Halim dalam buku Yoyo Sudaryo yang berjudul Keuangan di Era Otonomi Daerah (2017:34) mendefinisikan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditunjukkan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan pihak eksternal Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.”

Sedangkan menurut Mahmudi (2016:19), sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

“Kumpulan dari subsistem-subsistem yang didalam setiap subsistem tersebut terdapat tahap-tahap, prosedur, perangkat, dan peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan untuk pihak luar maupun internal pemerintah daerah.”

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data keuangan, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan dipergunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

2.1.1.2 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Indikator sistem akuntansi keuangan daerah yang dikemukakan oleh Abdul Halim & Syam Kusufi (2014:44) adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan
Pencatatan adalah pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan dan atau pengurangan atas sumber daya yang ada.
2. Pengidentifikasian (Penggolongan)
Pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak.
3. Pelaporan
pelaporan adalah transaksi ekonomi menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi.

Menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2015:99), mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

1. Pencatatan
2. Pengikhtisaran
3. Pelaporan

Adapun penjelasan indikator sistem akuntansi keuangan daerah sebagai berikut:

1. Pencatatan

- Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
- Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.
- Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.

2. Pengikhtisaran

- Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.
- Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling up to date.
- Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.
- Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan nol.
- Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat setelah dilakukan penutupan.
- Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.

3. Pelaporan.

Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menggunakan indikator sistem akuntansi keuangan daerah menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2015:99), yang mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator diatas dengan alasan bahwa keberhasilan suatu sistem akuntansi keuangan daerah dapat dilihat dari proses pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.2 Pengendalian Internal

2.1.2.1 Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:221) pengertian mengenai pengendalian internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan. Lebih lanjut, Faiz zamzami, Mukhlis, Anissa Eka Pramesti (2018:76-79) menjelaskan bahwa pengendalian internal adalah sebagai berikut:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, ketaatan peraturan perundang - undangan mengacu pada unsur yang meliputi, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.”

Pengendalian yang efektif merupakan ukuran untuk menjamin bahwa operasi dapat berjalan sukses dan dapat mengamankan sumber daya perusahaan. Pengendalian internal adalah konsep dinamis yang berjalan di dalam organisasi yang merupakan kebalikan dari serangkaian prosedur dasar. The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of the Treadway Commission dalam buku sistem akuntansi Sujarweni V. Wiratna (2015:69) menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam organisasi yang berada dalam proses manajemen dasar yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang didesain untuk menyediakan keyakinan yang memadai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dengan menjamin efisiensi dan efektivitas proses operasi, keandalan catatan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

2.1.2.2 Indikator Pengendalian Internal

Indikator pengendalian internal menggunakan pemikiran dari Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:224) adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
Lingkungan pengendalian berkenaan dengan tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan, dan prosedur-prosedur yang merefleksikan keseluruhan sikap manajemen, dewan komisaris, pemilik, dan pihak lainnya terhadap pentingnya pengendalian internal bagi entitas.
Faktor-faktor yang membentuk lingkungan pengendalian antara lain:
 - a. Integritas dan nilai etika
 - b. Komitmen terhadap kompetensi
 - c. Partisipasi dewan komisaris dan komite audit
 - d. Falsafah manajemen dan gaya operasinya
 - e. Struktur organisasi
 - f. Penetapan wewenang dan tanggungjawab
 - g. Kebijakan dan praktik di bidang sumber daya manusia
2. Penentuan Risiko Manajemen (*Risk Assessment Management*)
Penentuan risiko untuk pelaporan keuangan mencakup identifikasi, analisis, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
3. Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas.
Aktivitas pengendalian mencakup (yang relevan dengan laporan keuangan):
 - a. Pemisahan tugas (*separation of rule*)
 - b. Pengendalian pengolahan informasi (*information processing control*)
 - c. Pengendalian fisik (*physical controls*)
 - d. Review kinerja (*performance review*)

4. Informasi dan Komunikasi Akuntansi (*Information and Communication*)
Untuk berfungsi secara efisien dan efektif, organisasi memerlukan informasi relevan yang disediakan bagi orang dan pada saat yang tepat. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan dan untuk menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva, utang, dan ekuitas. Selain itu informasi harus pula andal dalam akurasi dan kelengkapannya. Komunikasi meliputi penyediaan deskripsi tugas individu dan tanggung jawab berkaitan dengan struktur pengendalian internal dalam pelaporan keuangan.
5. Pemantauan (*Monitoring*)
Pemantauan adalah proses penetapan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Berkenaan dengan penilaian efektivitas pengendalian internal secara terus menerus atau periodik oleh manajemen, untuk melihat apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan. Tujuan monitoring adalah untuk menentukan apakah pengendalian masih berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau perlu adanya perbaikan.

Sedangkan menurut Faiz zamzami, Ihda Arifin Faiz dan Mukhlisin (2018:76-79) COSO mengemukakan bahwa pengendalian internal memiliki lima indikator, yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Setiap unsur-unsur dalam kerangka kerja COSO memiliki subunsur yang merupakan penjabaran dari unsur tersebut. Tujuan pengendalian internal model COSO adalah menciptakan efektivitas dan efisiensi aktivitas operasi, menjamin terciptanya laporan keuangan yang andal, dan mendorong manajemen untuk mematuhi aturan yang berlaku. Berikut akan dijabarkan tiap-tiap unsur yang terdapat dalam kerangka kerja COSO.

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam organisasi yang memengaruhi efektivitas pengendalian internal. Oleh karena itu, organisasi harus membangun lingkungan kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian secara efektif.

Lingkungan pengendalian yang kondusif dibentuk oleh manajemen dan karyawan. Untuk membangun lingkungan tersebut, manajemen dan karyawan seharusnya mempunyai komitmen dan sikap yang positif dan konstruktif terhadap pengendalian internal. Kunci pengendalian interna adalah sebagai berikut:

1. Integritas dan etika
 2. Komitmen terhadap kompetensi
 3. Struktur Organisasi
 4. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab
 5. Praktik dan kebijakan sumber daya manusia yang baik
2. Penilaian Resiko

Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen melakukan penilaian resiko yang dihadapi oleh organisasi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Langkah-langkah dalam penaksiran resiko adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi resiko
2. Menaksir resiko yang berpengaruh cukup signifikan
3. Menentukan tindakan yang dilakukan untuk mengelola resiko

Aktivitas sebelum penaksiran resiko adalah penentuan tujuan internal untuk berbagai tingkatan. Penaksiran resiko adalah identifikasi dan analisis risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan, sebagai dasar untuk memperkirakan bagaimana resiko tersebut harus ditangani.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian seharusnya efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pengendalian tersebut. Aktivitas pengendalian meliputi hal-hal berikut:

1. Pemisahan fungsi/tugas/wewenang yang cukup
2. Otorisasi transaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai
3. Pendokumentasian dan pencatatan yang cukup
4. Pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan
5. Evaluasi secara independen atas kinerja
6. Pengendalian terhadap pemrosesan informasi
7. Pembatasan akses terhadap sumber daya dan catatan

Aktivitas pengendalian memberikan jaminan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menghadapi resiko dalam pencapaian tujuan entitas telah dilakukan. Aktivitas tersebut berjalan sepanjang hidup perusahaan, pada semua level dan pada semua fungsi.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi seharusnya dicatat dan dikomunikasikan kepada manajemen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan di dalam organisasi dan dalam bentuk dan jangka waktu yang memungkinkan diselenggarakannya pengendalian internal dan tanggungjawab lain terhadap informasi tersebut. Di dalam menjalankan dan mengendalikan

operasinya, manajemen harus mengomunikasikan kejadian yang relevan, andal, dan tepat waktu.

Semua personel harus melakukan pengendalian terhadap tanggungjawab, apakah tanggungjawab tersebut dapat dilaksanakan secara serius. Mereka harus memahami peranan mereka terhadap sistem pengendalian internal dan juga bagaimana aktivitas individu berhubungan dengan pekerjaan personel lain. Mereka harus memiliki media komunikasi dengan pihak luar.

5. Pemantauan

Pemantauan seharusnya menilai kualitas kinerja sepanjang waktu dan meyakinkan bahwa temuan-temuan audit dan tinjauan lainnya diselesaikan dengan tepat. Hal ini meliputi:

1. Mengevaluasi temuan dan rekomendasi audit atau tinjauan secara tepat
2. Menentukan tindakan yang tepat untuk menanggapi temuan dan rekomendasi dari audit atau tinjauan
3. Menyelesaikan dalam waktu yang telah ditentukan tentang tindakan yang digunakan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang menjadi perhatian manajemen.

Dari uraian diatas terdapat hubungan langsung antara tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dengan komponen yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan uraian indikator diatas, maka indikator pengendalian internal yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan indikator menurut Faiz zamzami, Ihda Arifin Faiz dan Mukhlisin (2018:76-79) meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator pengendalian internal diatas dengan alasan bahwa tingkat keberhasilan pengendalian intern pemerintah daerah diukur berdasarkan dipenuhinya lima kategori yang ditetapkan dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 ayat 3, yang menyebutkan bahwa, pengendalian intern sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: terciptakan lingkungan pengendalian yang sehat,

terselenggaranya penilaian risiko, terselenggaranya kegiatan pengendalian, terselenggarakannya sistem informasi dan komunikasi, dan terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

2.1.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mas Roro Lilik Ekowati (2017:110) akuntabilitas artinya meningkatkan rasa tanggung jawab para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Lebih lanjut Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif dan Nunung Ayu Sofianti. (2017:48) mendefinisikan akuntabilitas sebagai berikut:

“Akuntabilitas merupakan kewajiban individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban hukum dan kejujuran, proses, program dan kebijakan.”

Selanjutnya Moh. Khusani (2018:71) menjelaskan pengertian akuntabilitas sebagai berikut:

“Akuntabilitas merupakan inti dari proses anggaran. Akuntabilitas membuat pejabat yang mendapat tugas melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran harus dapat mengungkapkan bagaimana dana masyarakat akan digunakan.”

Sedangkan menurut Apiaty Kamaluddin dan Patta Rapanna (2017:256) menjelaskan pengertian akuntabilitas sebagai berikut:

“Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban hukum maupun moral yang melekat pada tiap-tiap individu, kelompok maupun perusahaan dalam memberikan penjelasan bagaimana penggunaan dana atau kewenangan yang telah diberikan. Tiap individu atau kelompok harus bisa menjelaskan mengenai penggunaan dana dan hal-hal apa saja yang telah dicapainya. Akuntabilitas ini dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan supaya semua mengetahui bagaimana kewenangan dan dana yang didapat tersebut dipergunakan.”

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan pemberian informasi atas aktivitas yang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagaimana apa yang telah dimandatkan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.3.2 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Abd. Rachim (2015:30), pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih lanjut Rosmery dkk (2016), menjelaskan pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.”

Sedangkan menurut Hendra Karianga (2017:10), mendefinisikan pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.”

Dan menurut Moh. Khusaini (2018:2), pengertian pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawas keuangan daerah.

2.1.3.3 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari lembaga-lembaga sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembagasektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban. Dimana akuntabilitas menurut Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif dan Nunung Ayu Sofianti. (2017:48) dapat diukur melalui beberapa indikator:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran
Akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Pada dasarnya, ketentuan hukum dibuat agar pelaksanaan segala kegiatan dapat berjalan dengan semestinya, terutama dalam hal pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan demikian pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kegiatannya secara jujur sesuai dengan hukum yang berlaku
2. Akuntabilitas Proses.
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pemerintah sebagai sarana pelayanan publik harus melaksanakan kegiatannya sesuai dengan proses yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, jangan sampai terjadi hal-hal yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
3. Akuntabilitas Program.
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Sebagai *development agent*, pemerintah harus selalu memiliki strategi yang tepat dalam pencapaian tujuan demi pelayanan masyarakat. Hal tersebut diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas pemerintah terhadap program yang telah ditentukan.
4. Akuntabilitas Kebijakan.
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Untuk menstabilkan

pemerintahan guna memberikan pelayanan publik yang terbaik maka pemerintah harus dapat membuat kebijakan-kebijakan yang tepat sehingga dapat sesuai dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kebijakan yang tepat dapat dilaksanakan pelayanan publik dengan baik.

Selain itu, terdapat ciri-ciri Pemerintahan yang Akuntabel menurut Sulistoni (2003:35) diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- c. Mampu menjelaskan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- d. Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja (performance) pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

Berdasarkan uraian indikator diatas, maka penulis menggunakan indikator akuntabilitas menurut Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif dan Nunung Ayu Sofianti. (2017:48), meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator diatas dengan alasan bahwa terciptanya pemerintahan yang bertanggungjawab dapat terwujud jika semua komponen dalam akuntabilitas itu terpenuhi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya kekayaan daerah serta keseluruhan kegiatan pemerintah daerah dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan,

tetapi berhak menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut.

Untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan dilaksanakannya sistem akuntansi keuangan daerah yang diciptakan oleh aparatur pemerintah daerah serta aparatur pemerintah daerah wajib melakukan pengendalian internal atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk memastikan strategi dijalankan dengan baik sehingga tujuan pemerintah yang akuntabel dapat dicapai.

Sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi, dan keabsahan pembelanjaan dana. Hal ini bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang tepat serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana. Begitupun dengan pengendalian internal yang memadai akan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.2.1 Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menurut Indra Bastian (2007:15), sistem akuntansi dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan sebagai alat untuk pertanggungjawaban, hal ini berlaku tidak hanya

di sektor swasta melainkan juga di sektor publik terlebih sejak era reformasi tuntutan masyarakat akan transparansi pemerintahan pusat maupun daerah dalam pengelolaan penerimaan dan penggunaan dana semakin besar. Masih menurut Indra Bastian (2007:2) Diperlukan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Sedangkan menurut Abdul Halim (2004:5), yaitu agar akuntabilitas sektor publik dapat dilaksanakan diperlukan sistem akuntansi yang memadai, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparansi, adil, efektif, efisien. Dengan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) diharapkan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan dapat tercapai, serta menurut Abdul Halim (2012:35) dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah daerah menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban pengguna dana.

Teori diatas didukung oleh penelitian seperti yang dilakukan oleh Eka Suprihartini, Akram dan Budi Santoso (2017) dalam jurnal internasional, menyatakan bahwa *the test results using the PLS was found that the regional financial accounting system has positive influence on financial accountability.*

Menurut Winda Amelia (2017) sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Maria Magdalena Hesti Kurniawati (2016),

mengatakan bahwa semakin tinggi sistem akuntansi keuangan daerah maka secara otomatis akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handri, Y.P dkk (2014) yang mengungkapkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah dirancang untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan. Dengan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik akan mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan referensi-referensi diatas maka dirumuskan hipotesis pertama pada penelitian ini adalah implementasi sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.2.2 Pengaruh Implementasi Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hubungan antara pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menurut Abdul Halim (2004:258), yaitu untuk mendukung akuntabilitas, dibutuhkan adanya pengendalian internal yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Rahmadi Murwanto (2012:195), mengungkapkan bahwa pengendalian internal merupakan bagian utama dalam pengelolaan suatu organisasi. Pengendalian internal terdiri dari rencana-rencana, metode-metode, dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi sehingga mendukung suatu sistem manajemen

berbasis kinerja. Pengendalian intern juga berperan sebagai perlindungan di garis depan dalam menjaga aset/harta dan mencegah dan mendeteksi kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan. Pengendalian intern membantu manajemen instansi pemerintah dalam mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik yang efektif.

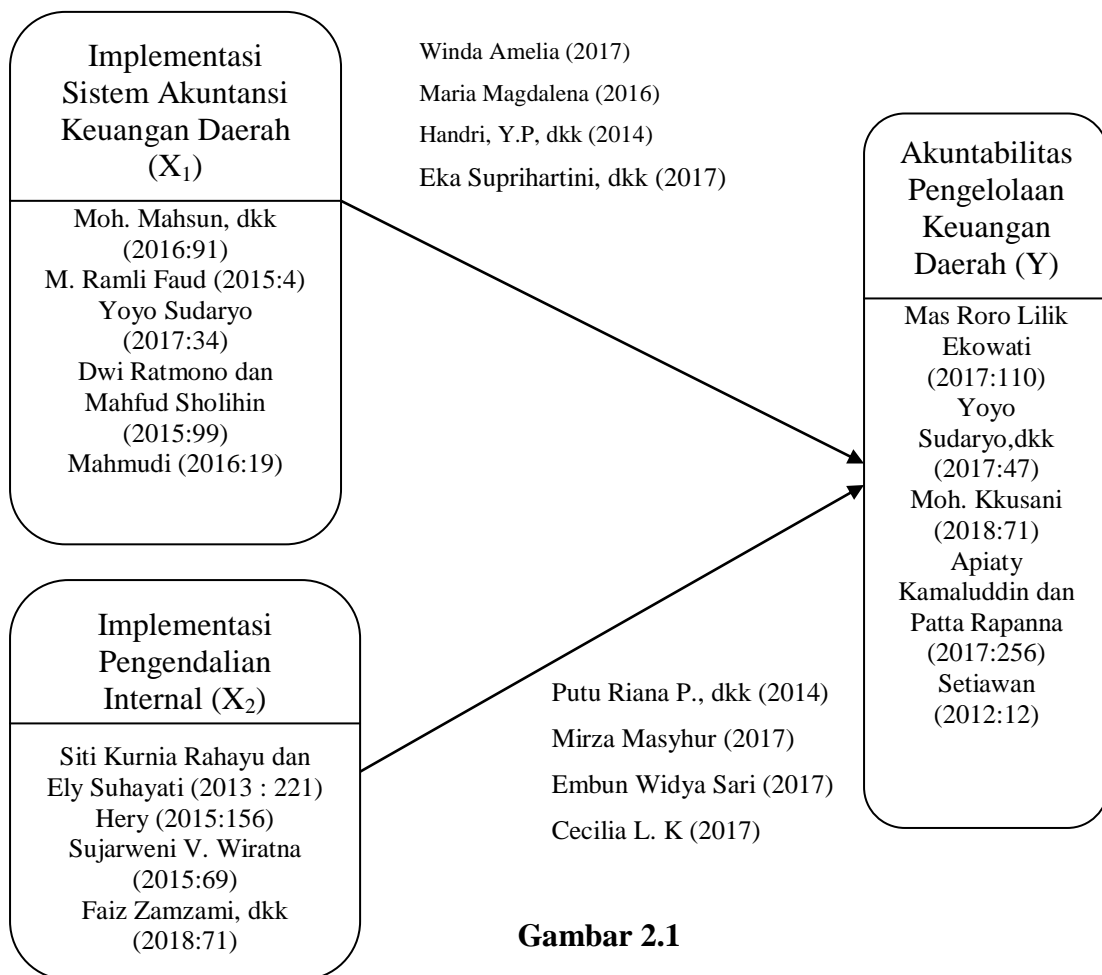
Teori diatas didukung oleh penelitian seperti yang dilakukan oleh Cecilia Lelly Kewo (2017) dalam jurnal internasional, menyatakan bahwa *the implementation of internal control influence on financial accountability of local governments in Indonesia. The better the application of internal control that will make the financial accountability of the local government is also getting better.*

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Diketahui dengan pengendalian internal semakin meningkat maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada SKPD yang terdapat di Kabupaten Klungkung akan semakin meningkat pula (Putu Riana Primayani, Nyoman Trisna Herawati, Nyoman Ari Surya Darmawan, 2014).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mirza Masyhur (2017), pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengendalian internal yang baik akan memberikan aturan yang baik dan jelas dalam tubuh SKPD sehingga sistem yang ada didalam pengelolaan keuangan jadi lebih terstruktur dan baik. Sehingga akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan terwujudnya

kepercayaan publik kepada pemerintah daerah. Hal ini didukung dengan kemampuan setiap pimpinan SKPD untuk memberikan pengetahuan dan sistem yang jelas serta tegas dalam pelaksanaannya. Embun Widya Sari (2017), dalam penelitiannya juga membuktikan bahwa Pengendalian Intern yang efektif berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Berdasarkan referensi-referensi diatas maka dirumuskan hipotesis kedua pada penelitian ini adalah implementasi pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1

Gambar Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke tiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran. Menurut Sugiyono (2017:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.”

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

- H1= Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- H2 = Implementasi Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah